

MAKALAH KEBIJAKAN PERTANIAN

“TOKO TANI INDONESIA (TTI)”



Disusun oleh :

Muhammad Hilmy Fuadi	H0817063
Yuniar Fajri Winarno	H0817112

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	ii
A. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Permasalahan	2
3. Tujuan	3
B. TINJAUAN PUSTAKA.....	4
C. HASIL DAN PEMBAHASAN	8
D. KESIMPULAN DAN SARAN	
1. Kesimpulan	18
2. Saran	19
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bagan Skema Model Kegiatan Toko Tani Indonesia.....	10
Gambar 3.2 Jual Beli di Toko Tani Indonesia	16
Gambar 3.3 Toko Tani Indonesia.....	19

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agribisnis merupakan sistem rantai pasok produk pertanian yang diproduksi oleh petani hingga dipasarkan ke konsumen akhir. Menurut Masyhuri (2001) sebagai suatu sistem, agribisnis terdiri dari lima subsistem yang terintegrasi, yaitu subsistem input produksi pertanian, subsistem produksi pertanian, subsistem pengolahan hasil – hasil pertanian, subsistem pemasaran, subsistem penunjang. Namun sistem agribisnis di Indonesia masih belum efektif dan efisien. Hal ini terjadi karena panjangnya rantai pasok dari petani hingga ke konsumen akhir. Panjangnya rantai pasok membuat terjadi perbedaan harga di petani dengan harga.

Permasalahan gejolak harga pangan hingga saat ini masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan. Harga pangan yang berfluktuasi akan mempengaruhi kesejahteraan petani selaku produsen pangan maupun masyarakat luas selaku konsumen akhir. Oleh karena itu, stabilisasi harga pangan menjadi salah satu tujuan prioritas dalam pembangunan nasional.

Kementerian Pertanian memiliki peranan penting dalam mengatasi permasalahan rantai pasok di Indonesia. Salah satu upaya kementerian pertanian adalah merancang dan melaksanakan program Toko Tani Indonesia (TTI). Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2015 dengan diresmikan oleh Menteri Pertanian Indonesia Bapak Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, MP. TTI pada dasarnya merupakan bagian dari model Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). TTI (Toko Tani Indonesia) dibentuk dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, rantai distribusi pemasaran yang terintegrasi agar lebih efisien, harga konsumen dapat ditransmisikan dengan baik kepada harga petani (produsen), informasi pasar antar wilayah berjalan dengan baik, mencegah terjadinya Patron-Client (pemasukan pangan ke pasar suatu wilayah hanya boleh dipasok oleh pelaku usaha tertentu), dan mencegah penyalahgunaan *market power* oleh pelaku

usaha tertentu. TTI sudah tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Pada tahun 2016 sudah tercatat sekitar 493 TTI di 32 provinsi tersebut yang diterima konsumen.

Pelaku rantai pasok dari program Kementerian Pertanian antara lain petani, Gabungan kelompok tani (Gapoktan), TTI dan konsumen. Rantai pasok berawal dari petani yang memproduksi produk hortikultura kemudian produk tersebut di kumpulkan oleh Gapoktan untuk didistribusikan ke TTI. Harga yang diterima petani berdasarkan kondisi harga pokok pemerintah atau harga diatas kondisi keseimbangan antara penawaran dengan permintaan. Upaya pemerintah mengendalikan harga-harga pangan, dilakukan oleh Kementerian Pertanian dengan memotong rantai pasok (*supply chain*) pangan yang semula 7-8 pihak menjadi hanya 3-4 pihak. Diharapkan dengan berkurangnya pihak-pihak terkait dalam rantai pasok, harga pangan dapat turun.

Berdasarkan sistem program TTI dapat disimpulkan bahwa program ini memberikan sistem yang memotong jalur distribusi menjadi efisien. Efisiensi jalur distribusi diharapkan memberikan profitabilitas bagi petani dan kepuasan bagi konsumen dari segi harga yang diterima. Penting bagi Toko Tani Indonesia untuk memperhatikan kepuasan para stakeholder terutama pihak konsumen yang berperan sebagai pembeli produk pertanian agar tujuan dari Toko Tani Indonesia dapat tercapai.

B. Permasalahan

Permasalahan yang harus diselesaikan dalam Makalah Toko Tani Indonesia (TTI) antara lain :

1. Bagaimana konsep yang diterapkan oleh program Toko Tani Indonesia (TTI)?
2. Bagaimana implementasi dari program Toko Tani Indonesia (TTI)?
3. Apa saja hambatan yang dialami dalam pelaksanaan program Toko Tani Indonesia (TTI)?
4. Apa saja faktor yang menjadi fokus untuk pengembangan program Toko Tani Indonesia (TTI)?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari Makalah Toko Tani Indonesia (TTI) ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui konsep yang diterapkan oleh program Toko Tani Indonesia (TTI).
2. Mengetahui implementasi dari program Toko Tani Indonesia (TTI).
3. Mengetahui hambatan yang dialami dalam pelaksanaan program Toko Tani Indonesia (TTI).
4. Mengetahui faktor yang menjadi fokus untuk pengembangan program Toko Tani Indonesia (TTI).

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Ketahanan Pangan

Beberapa ahli sepakat bahwa ketahanan pangan minimal mengandung dua unsur pokok, yaitu “ketersediaan pangan” dan “aksesibilitas masyarakat” terhadap bahan pangan tersebut. Salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik, walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional atau di tingkat regional, tetapi akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya sangat tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh. Aspek distribusi bahan pangan sampai pelosok rumah tangga pedesaan yang tentunya mencakup fungsi tempat, ruang, dan waktu juga tidak kalah pentingnya dalam upaya memperkuat strategi ketahanan pangan (Arifin, 2001).

Menurut Nurmala et al (2012), Kebijakan Ketahanan Pangan pada aspek distribusi, merupakan kebijakan ketahanan pangan yang diarahkan untuk : (a) mengembangkan sarana dan prasarana distribusi pangan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan, termasuk didalamnya mengurangi kerusakan bahan pangan dan kerugian akibat distribusi yang tidak efisien, (b) mengurangi dan/atau menghilangkan peraturan daerah yang menghambat distribusi pangan antardaerah, dan (c) mengembangkan kelembagaan pengolahan dan pemasaran di perdesaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi pangan serta mendorong peningkatan nilai tambah.

Permasalahan secara umum mengenai ketahanan pangan adalah jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan penduduk yang positif. Dengan demikian permintaan pangan masih akan meningkat. Peningkatan permintaan pangan juga didorong oleh peningkatan pendapatan, kesadaran akan kesehatan dan pergeseran pola makan karena pengaruh globalisasi, serta ragam aktivitas masyarakat. Di sisi lain, ketersediaan sumber daya lahan semakin berkurang, karena tekanan penduduk serta persaingan pemanfaatan lahan antara sektor pangan dengan sektor non pangan. Secara spesifik, permasalahan sehubungan

dengan ketahanan pangan adalah penyediaan, distribusi, dan konsumsi pangan (Purwaningsih, 2008).

Kesejahteraan petani merupakan tantangan pemerintah daerah di era otonomi. Otonomi daerah hendaknya mendekatkan pemerintah kepada petani, menunjukkan kepedulian kepada petani dan pertanian, mempercepat pemecahan masalah petani dan pertanian. Dengan otonomi daerah pemda memiliki posisi strategis dengan keleluasaan untuk menelorkan kebijakan dan program pembangunan pertanian yang semakin fokus, bisa menemukan komoditas unggulan sesuai potensi lokal, dan menemukan beragam upaya inovasi nilai tambah produk pertanian. Dengan otonomi, idealnya permasalahan yang dihadapi petani dan pertanian dengan cepat diketahui dan diberikan solusi yang memadai (Sunarti dan Khomsan, 2006).

B. Toko Tani Indonesia

Menurut Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor: 06/KPTS/RC.IIO/J/01/2017 Toko Tani Indonesia yang selanjutnya disingkat TTI adalah toko / warung/ kios/ pedagang komoditas pangan yang bermitra dengan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat untuk menjual komoditas pangan hasil produksi petani sesuai harga yang wajar kepada konsumen dan pasokan dari mitra industri pangan. Tujuan dibentuknya Toko Tani Indonesia yaitu untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, rantai distribusi pemasaran yang terintegrasi agar lebih efisien, harga konsumen dapat ditransmisikan dengan baik kepada harga petani (produsen), informasi pasar antar wilayah berjalan dengan baik, mencegah terjadinya Patron-Client (pemasukan pangan ke pasar suatu wilayah hanya boleh dipasok oleh pelaku usaha tertentu), dan mencegah penyalahgunaan market power oleh pelaku usaha tertentu (Kementan, 2017).

Pemerintah meluncurkan program Toko Tani Indonesia (TTI) yang diharapkan bisa membentuk struktur pasar baru yang lebih efisien. Adanya TTI diharapkan dapat memangkas rantai pasok pangan yang semula melalui 7-8 pihak menjadi 3-4 pihak. Tidak hanya beras, TTI juga menyediakan bahan pangan lain seperti telur, daging sapi, daging ayam, bawang, cabai, gula pasir

dan minyak goreng. Sehingga diharapkan perubahan struktur pasar terjadi pada setiap komoditas pangan. Berbeda dengan pasasr biasa yang harus melalui distributor dan agen, suplai bahan pangan TTI diperoleh langsung dari gabungan kelompok tani (Gapoktan) atau Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) (Kurniasari, 2016).

Toko Tani Indonesia (TTI) adalah salah satu program pertanian pemerintah lewat Departemen Pertanian untuk memangkas rantai pasok bahan pangan. Program ini membawa misi untuk melindungi produsen dari jatuhnya harga dan disisi lain, melindungi konsumen dari tingginya harga pangan sehingga tercipta tata niaga pangan yang berkeadilan. Toko Tani Indonesia mengubah struktur pasar dengan menjaga keseimbangan antara petani, pedagang dan juga konsumen. Rantai pasok pangan semula harus melewati 7-8 pihak yakni, petani – pinggilingan (importir) – distributor – sub distributor – agen – sub agen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir. Tata niaga pangan baru yang ditawarkan kementrian pertanian ini adalah membawa petani menyalurkan produk pertanian ke Gapoktan – Toko Tani Indonesia (TTI) dan akhirnya kepada konsumen. Diharapkan dengan sistem seperti ini konsumen mendapat harga yang wajar dan petani dapat tetap memperoleh keuntungan (Agritani, 2016).

C. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi petani dalam lembaga-lembaga lokal merupakan manifestasi keberdayaan masyarakat. Petani yang berdaya, menurut Susetawan (2000), adalah petani yang secara politik dapat mengartikulasikan (menyampaikan perwujudan) kepentingannya, secara ekonomi dapat melakukan proses tawarmenawar dengan pihak lain dalam kegiatan ekonomi, secara sosial dapat mengelola mengatur komunitas dan mengambil keputusan secara mandiri, dan secara budaya diakui eksistensinya.

Menurut (Diana Conyers, 1954; dalam Suparjan dan Suyatno 2003), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat

setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Alasan kedua yaitu bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa diibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Berbagai usaha untuk mencapai proyek-proyek swadaya di negara berkembang menunjukkan bahwa bantuan masyarakat setempat sangat sulit diharapkan jika mereka tidak diikutsertakan. Alasan ketiga, partisipasi menjadi urgent karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki hak untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka. Hal ini selaras dengan konsep mancentered development, yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan pada perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar sebagai alat pembangunan itu sendiri.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep yang Diterapkan Oleh Program Toko Tani Indonesia (TTI)

Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat atau yang disingkat PUPM adalah kegiatan memberdayakan lembaga usaha pangan masyarakat atau gabungan kelompok tani dalam melayani Toko Tani Indonesia untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan. Toko Tani Indonesia yang selanjutnya disingkat TTI adalah yang dirancang untuk menjual komoditas pangan hasil produksi petani sesuai harga yang wajar kepada konsumen yang dipasok oleh Gapoktan atau Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM), dan atau Perum Bulog.

Konsep utama Toko Tani Indonesia adalah menjamin harga pembelian dengan mempertimbangkan keuntungan petani yang wajar dan harga eceran terjangkau di masyarakat. TTI merupakan bagian dari upaya membenahi struktur dan rantai pasok pangan di Indonesia. Melalui pendekatan tersebut, rantai pasok dipangkas hanya menjadi tiga tahap sehingga diharapkan akan mampu membentuk struktur pasar yang baru. Toko Tani Indonesia (TTI) melakukan perubahan struktur pasar baru, dengan tetap menjaga keseimbangan antara produsen, pedagang, dan konsumen.

Pada sistem awal, sebuah produk pangan harus melewati 8 step untuk menuju konsumen. Mulai dari petani → penggilingan (importir) → distributor → sub distributor → agen → sub agen → pedagang grosir → pedagang eceran → konsumen akhir. Panjangnya rantai pasok pangan dinilai sebagai salah satu hal yang menyebabkan harga pangan menjadi mahal. Struktur baru yang ditawarkan oleh Kementerian Pertanian adalah membuat petani menyalurkan produk ke Gapoktan → Toko Tani Indonesia (TTI) dan langsung konsumen akhir. Diharapkan dengan sistem ini harga pangan menjadi murah dan produsen dapat tetap memperoleh keuntungan yang wajar. Kementerian Pertanian juga menggandeng pedagang untuk berpartisipasi mengoperasikan TTI.

Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui kegiatan Toko Tani Indonesia (TTI) memiliki tujuan, sasaran, dan manfaat sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan Pedoman Pelaksanaan ini adalah untuk memberikan arah dan petunjuk kepada aparat pemerintah pusat dan daerah, Perum BULOG, Gapoktan/LUPM dan Pedagang TTI. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan PUPM dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

- 1) menyerap produk pertanian nasional dengan harga yang layak dan menguntungkan petani khususnya bahan pangan pokok dan strategis;
- 2) mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan strategis;
- 3) memberikan kemudahan akses konsumen/masyarakat terhadap bahan pangan pokok dan strategis, dengan harga yang terjangkau dan wajar.

b. Sasaran

Sasaran kegiatan PUPM pada Tahun Anggaran 2016 adalah 500 (lima ratus) Gapoktan/LUPM yang melayani 1.000 (seribu) TTI, untuk kemudahan akses pangan kepada masyarakat dengan harga yang wajar di 33 provinsi tersebar di kabupaten/kota di daerah konsumen utamanya yang menjadi barometer fluktuasi harga dan pasokan.

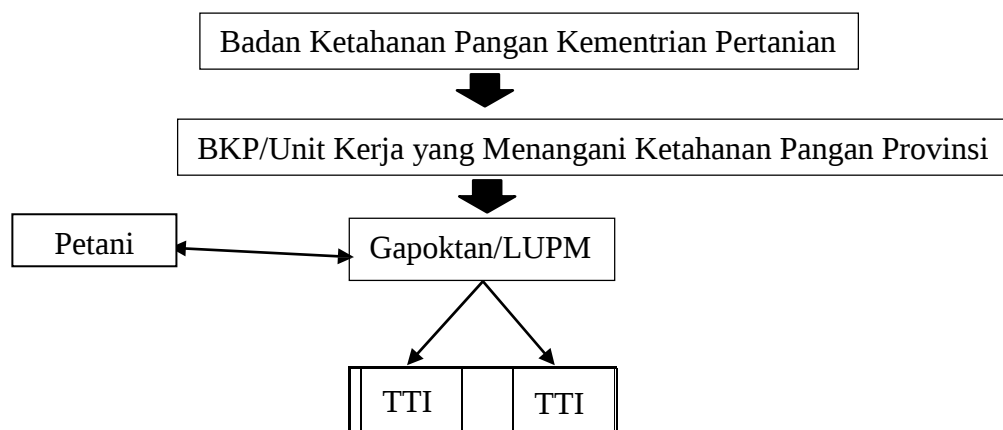
c. Manfaat

Adanya Toko Tani Indonesia memiliki berbagai manfaat yang menguntungkan banyak pihak, yaitu :

- 1) Rantai pasok pangan menjadi pendek, yang semula 7-8 pihak menjadi 3-4 pihak saja, hal ini dapat membuat harga pangan lebih stabil, selain itu stok beras di BULOG dapat memadai.
- 2) Disparitas harga yang rendah, yaitu produsen dapat menikmati keuntungan wajar, dan konsumen mendapat harga yang murah. Hal ini dapat membuat inflasi mudah di kontrol.

- 3) Mengubah struktur pasar, yaitu terbentuknya struktur pasar yang baru, terjadinya keseimbangan antara produsen-pedagang-konsumen. Disini pedagang tidak lagi menjadi price maker dan petani sebagai price taker

Pelaksanaan kegiatan PUPM dilaksanakan melalui dukungan dana APBN. Kegiatan ini dilaksanakan melalui alokasi dana Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian dalam bentuk dana dekonsentrasi yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan urusan di bidang ketahanan pangan Provinsi. Dana yang dialokasikan tersebut disalurkan kepada Gapoktan/LUPM yang bergerak di bidang pangan dalam bentuk dana Bantuan Pemerintah untuk melakukan pembelian pangan pokok dan strategis dari petani/mitra dan selanjutnya memasok pangan pokok dan strategis tersebut kepada TTI untuk dijual kepada konsumen dengan harga yang layak. Dalam hal ini TTI yang dimaksud adalah pedagang yang menjadi mitra Gapoktan/LUPM yang bergerak di bidang pangan yang terikat melalui kerjasama antara kedua belah pihak



Gambar 3.1 Bagan Skema Model Kegiatan Toko Tani Indonesia

Pemanfaatan dana bantuan pemerintah hanya untuk digunakan di tahun berjalan. Jika terdapat dana yang tidak digunakan harus disetor ke kas Negara di akhir tahun. pemanfaatan dana bantuan pemerintah hanya untuk digunakan di tahun berjalan. Jika terdapat dana yang tidak

digunakan harus disetor ke kas Negara di akhir tahun. setelah dana bantuan pemerintah dicairkan kepada Gapoktan/ LUPM, pemanfaatan dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan dan waktu pelaksanaan yang dibuat dalam bentuk usulan rencana pembelian bahan pangan pokok kepada petani/mitra dan usulan pasokan oleh TTI kepada Gapoktan/LUPM. Tahap pertama dapat dicairkan maksimal 60% dan sisanya sebesar 40% dapat diajukan untuk pencairan tahap kedua yakni setelah penggunaan dana tahap pertama sebesar minimal 50% yang dibuktikan dengan laporan pemanfaatan dana

Harga pembelian di tingkat petani ditetapkan oleh pemerintah. Penetapan harga pembelian di tingkat petani dilakukan untuk memberikan jaminan kepada petani agar mendapat keuntungan yang wajar, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Penetapan harga minimal pembelian petani merujuk pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk beras dan atau harga beli untuk komoditas lainnya apabila harga pembelian di bawah HPP. Selain itu harga jual TTI ke konsumen ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan kondisi harga normal di suatu wilayah. Harga jual TTI di tentukan berdasarkan harga beras rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir, dengan keuntungan tidak lebih dari 2,5% dan harus lebih rendah dari harga pasar. Data harga tersebut didapat dari data Badan Pusat Statistik maupun panel harga.

B. Implementasi dari Program Toko Tani Indonesia (TTI)

Kementerian Pertanian memiliki peranan penting dalam mengatasi permasalahan rantai pasok di Indonesia. Salah satu upaya kementerian pertanian adalah merancang dan melaksanakan program Toko Tani Indonesia. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2015 dengan diresmikan oleh Menteri Pertanian Indonesia Bapak Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, MP. Tujuan utama dari program Toko Tani Indonesia (TTI) adalah memotong rantai pasok sistem agribisnis Indonesia sehingga memberikan tingkat keuntungan yang seimbang antara keuntungan harga yang diterima petani dan keuntungan yang didapat konsumen dari harga

produk yang lebih murah. TTI sudah tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Pada tahun 2016 sudah tercatat 406 Gapoktan dan 1.113 TTI di 32 provinsi tersebut. Toko Tani setidaknya menjual 10 komoditas pangan dengan harga murah, seperti bawang merah, bawang putih, daging ayam, daging sapi, telur, cabai merah keriting, cabai rawit, minyak goreng, gula, dan beras.

Pada Tahun 2017 kegiatan dikembangkan dengan beberapa penyempurnaan konsep dan teknis pelaksanaan sesuai dengan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan PUPM tahun 2016 baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pada tahun 2017 ini jumlah Toko Tani Indonesia mencapai 2.839 TTI di 32 provinsi termasuk didalamnya 1.113 TTI di wilayah Jabodetabek. Pada akhir Desember 2017 Kementerian Pertanian (Kementan) merilis aplikasi Toko Tani Indonesia (TTI) berbasis daring yang melibatkan petani, masyarakat, lembaga keuangan dan sistem transportasi yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan untuk masyarakat lebih luas, mudah dan murah. Dalam keberjalanannya Toko Tani Indonesia Online tersebut akan menjadi penghubung yang mempertemukan antara Gabungan Kelompok Tani dengan TTI untuk memfasilitasi akses suplai dan permintaan. Sementara TTI Center akan berperan sebagai penghubung terhadap produk-produk dari Gapoktan, yang akan didistribusikan ke TTI.

Jumlah Toko Tani Indonesia pada tahun 2018 mencapai 3655 TTI dengan menggandeng 1399 gapoktan. Adapun jumlah tersebut kembali meningkat pada tahun 2019. TTI yang didirikan bertambah sebanyak 1.198 unit dan dipasok dari 500 gapoktan. Secara kumulatif kurun waktu 2015-2019, TTI yang telah dibangun mencapai 5.051 outlet yang tersebar di 32 provinsi. Pada Tahun 2020 ini Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menargetkan dapat membangun 2.000 unit Toko Tani Indonesia (TTI) baru. Pendirian TTI yang lebih tersebar diharapkan dapat membantu dalam upaya stabilisasi harga pangan pokok sebab harga

pangan yang dijual di bawah rata-rata harga pasar. Pada tahun 2020 ini BKP Kementerian Pertanian resmi melakukan kerja sama dengan Gojek untuk mendistribusikan produk pangan di Toko Tani Indonesia. Melalui kerja sama ini diharapkan kebutuhan pangan masyarakat dapat tetap terpenuhi dimasa wabah pandemi Covid-19 ini.

C. Hambatan yang Dialami Dalam Pelaksanaan Program Toko Tani Indonesia (TTI)

Menurut Badan Ketahanan Pangan (2016), dalam perkembangan pelaksanaan kegiatan, ada beberapa hambatan yang sifatnya teknis di lapangan sehingga diperlukan penyesuaian dalam Pedoman Teknis. Beberapa hal penting lain yang perlu dicermati adalah adanya perubahan regulasi dalam penentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 dan tentang Kualitas Mutu Beras yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2017, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pedoman Teknis PUPM. Menurut Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian 2016, hal lain yang perlu masukan selanjutnya dalam pengembangan kegiatan PUPM yaitu: bentuk kemasan, konsep pengembangan TTIC di daerah, solusi terhadap tingginya harga gabah karena banyak tanaman terserang hama, kelayakan pencairan dan pemanfaatan dana bantuan pemerintah di TTI, serta optimalisasi suplai bahan pangan oleh PUPM dan penjualan di TTI. Menurut Kementerian Pertanian Indonesia, melalui perbaikan yang sifatnya teknis, permasalahan dalam pasokan ke wilayah di Jabodetabek sudah mendapatkan solusinya melalui kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung pendistribusian pangan ke TTI di seluruh Indonesia. Diharapkan kedepannya kegiatan PUPM melalui TTI ini dapat terlaksana secara tertib administrasi, transparan, dan akuntabel. Keberhasilannya kegiatan PUPM sangat ditentukan oleh dukungan dan komitmen dari seluruh unsur Badan Ketahanan Pangan maupun Dinas Ketahanan Pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Selain teknis pelaksanaan program, terdapat hambatan lain yaitu

banyaknya syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin menjadi bagian dari Toko Tani Indonesia (TTI). Hal ini menyebabkan partisipasi dari masyarakat menjadi kurang sehingga perkembangan TTI menjadi kurang maksimal. Dari Bina Mandiri Utama Wordpress, kriteria yang harus dipenuhi Toko Tani Indonesia (TTI) yang akan menjadi pelaksana kegiatan atau sebagai mitra gapoktan yaitu: (1) pedagang tetap, (2) memiliki tempat usaha milik pribadi atau sewa, (3) berlokasi strategis yang mudah dijangkau konsumen, (4) memiliki SIUP/NPWP/UD (minimal surat izin usaha dari desa), (5) berpengalaman dalam kegiatan perdagangan pangan minimal satu tahun, (6) tidak sedang bermasalah dalam hutang/piutang dengan pihak manapun. Selain kriteria yang harus dipenuhi, adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh Toko Tani Indonesia (TTI) yaitu sanggup melakukan kontrak kerjasama dengan gapoktan, dan sanggup membuat pembukuan dan pelaporan secara tertib dan periodik dalam menjual produk pangan TTI dan membuat catatan transaksi penjualan khusus (Badan Ketahanan Pangan, 2016). Banyaknya persyaratan ini membuat para pedagang kecil enggan untuk menjadi bagian dari TTI.

Partisipasi petani dalam pelaksanaan program pertanian juga sangat diperlukan. Adanya partisipasi dari petani, suatu program diharapkan mampu terlaksana sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) yang menaungi TTI merupakan program yang dilaksanakan untuk petani-petani anggota gapoktan, karena gapoktan sendiri merupakan sasaran dari program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Gapoktan dinilai lebih menguntungkan daripada para petani yang melakukan usaha tani secara individu, sehingga gapoktan ini diharapkan dapat ikut mengembangkan TTI melalui PUPM secara maksimal dalam penyediaan produk pertanian di TTI. Elizabeth (2008), menyatakan bahwa partisipatif dalam proses pembangunan diantaranya melalui berbagai program kebijakan pembangunan pertanian dimaksudkan agar dapat menjembatani antara aspirasi dan kebutuhan masyarakat petani di pedesaan. Selain itu, makna partisipatif juga diharapkan dapat menggugah kesadaran

publik bahwa terjadinya keberhasilan maupun kegagalan proses pembangunan pertanian di pedesaan bukan tanggung jawab pemerintah semata, melainkan sangat bergantung pada keberhasilan keterlibatan masyarakat petani dalam penyelenggaraan pembangunan tersebut, dari awal hingga akhir, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Kurangnya partisipasi dari petani anggota gapoktan sendiri menjadikan program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) yang menjadi akar dari Toko Tani Indonesia (TTI) tidak dapat memberikan manfaat secara maksimal, dan sebagai imbasnya pembangunan pertanian dapat terhambat.

D. Faktor yang Menjadi Fokus Untuk Pengembangan Program Toko Tani Indonesia (TTI).

Menurut Gigih (2018), hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan Toko Tani Indonesia (TTI) antara lain :

1) Ketersediaan Produk

Bagi konsumen, ketersediaan produk pertanian merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Ketersediaan produk patut diperhatikan supaya ketika konsumen membutuhkan suatu produk, produk tersebut tersedia dan konsumen tidak perlu menunggu untuk mendapatkannya. Menjaga ketersediaan produk juga dapat menjaga *trust* dari konsumen. Ketersediaan produk memiliki skor tingkat kepentingan sebesar 432.

2) Kualitas dan Ketahanan Produk

Kualitas atau mutu produk merupakan hal yang sering dijadikan bahan pertimbangan utama oleh konsumen untuk membeli suatu produk. Maka dari itu, ketahanan dari sebuah produk menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Proses pasca panen menjadi sangat penting dalam menjaga kualitas produk. Mulai dari penyimpanan hingga pengemasan harus dijaga sedemikian rupa supaya kualitas produk tetap terjaga. Kualitas dan Ketahanan Produk memiliki skor tingkat

kepentingan sebesar 444.

3) Sikap dan Penampilan Pegawai

Konsumen akan merasa senang apabila mendapat perlakuan baik dari penjual. Perlakuan tersebut meliputi kejujuran, keramahan, kecekatan, dan ketepatan dalam melayani konsumen. Penampilan yang rapih dan bersih juga dapat menambah keyakinan konsumen akan kualitas kerja pegawai TTI. Sikap dan penampilan pegawai memiliki skor tingkat kepentingan sebesar 430.



Gambar 3.2 Jual Beli di Toko Tani Indonesia

4) Harga Produk

Harga menjadi hal yang sering dijadikan sebagai bahan pertimbangan utama oleh konsumen. Maka dari itu TTI harus sebisa mungkin menjaga harga produk pertanian tidak fluktuatif. TTI juga harus bisa menjaga supaya harga produk pertanian tidak terlalu mahal supaya tidak merugikan konsumen, dan tidak terlalu murah supaya tidak merugikan produsen. Harga produk memiliki skor tingkat kepentingan sebesar 444.

5) Lokasi dan Kenyamanan Toko

Pemilihan lokasi merupakan hal yang perlu diperhatikan karena pemilihan lokasi berhubungan dengan kemudahan akses bagi konsumen. Semakin sulit akses menuju lokasi maka konsumen akan

merasa kesulitan. Kebersihan dan kenyamanan toko merupakan salah satu cara Toko Tani Indonesia memberikan pelayanan kepada konsumen. Setiap hari karyawan di Toko Tani Indonesia membersihkan kondisi toko dengan tujuan agar konsumen merasa nyaman untuk berbelanja. Lokasi dan kenyamanan toko memiliki skor tingkat kepentingan sebesar 460.



Gambar 3.3 Toko Tani Indonesia

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari Makalah Toko Tani Indonesia (TTI) sebagai berikut :

1. Konsep utama Toko Tani Indonesia adalah menjamin harga pembelian dengan mempertimbangkan keuntungan petani yang wajar dan harga eceran terjangkau di masyarakat, hal ini diterapkan dengan memangkas rantai pemasaran yang biasanya melewati 8 step menjadi 4 step.
2. Toko Tani Indonesia (TTI) mulai diresmikan pada tahun 2015. Pada akhir Desember 2017 Kementerian Pertanian (Kementan) merilis aplikasi Toko Tani Indonesia (TTI) berbasis daring yang melibatkan petani, masyarakat, lembaga keuangan dan sistem transportasi. Secara kumulatif kurun waktu 2015-2019, TTI yang telah dibangun mencapai 5.051 outlet yang tersebar di 32 provinsi.
3. Dalam perkembangan pelaksanaan kegiatan, ada beberapa hambatan yang sifatnya teknis di lapangan seperti dalam teknis pelaksanaan belum menyesuaikan dengan regulasi terbaru dalam penentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 dan tentang Kualitas Mutu Beras yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2017. Hambatan lain yaitu tingginya harga gabah karena banyak tanaman terserang hama, suplai bahan pangan oleh PUPM yang kurang maksimal menyebabkan terganggunya ketersediaan bahan pangan di TTI, banyaknya syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin menjadi bagian dari TTI, dan masih kurangnya partisipasi dari Gapoktan.
4. Faktor yang menjadi fokus untuk pengembangan program Toko Tani Indonesia (TTI) antara lain ketersediaan produk, kualitas dan ketahanan produk, sikap dan penampilan pegawai, lokasi dan kenyamanan toko, dan harga produk.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dari Makalah Toko Tani Indonesia (TTI) sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pedoman Teknis PUPM yang menjadi naungan TTI terkait adanya perubahan regulasi dalam penentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 dan tentang Kualitas Mutu Beras yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2017.
2. Perlu dikaji lagi konsep mengenai pengembangan TTI di daerah, solusi terhadap tingginya harga komoditas tertentu akibat keadaan yang tidak terduga, optimalisasi suplai bahan pangan oleh PUPM dan penjualan di TTI, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam TTI.

DAFTAR PUSTAKA

- Agritani. 2016. Toko Tani Indonesia (TTI) : Potong Rantai Pasok, Normalkan Harga Pangan. <https://agritani.id/toko-tani-indonesia-tti-potong-rantai-pasok-normalkan-harga/>.
- Arifin, Arief. 2001. *Hutan dan Kehutanan*. Yogyakarta : Kanisius.
- Bayyummi Garindra. 2018. Sikap petani terhadap program Toko Tani Indonesia (TTI) di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- BKP. 2017. Rapat Koordinasi Teknis Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). <http://bkp.pertanian.go.id/blog/post/rapat-koordinasi-teknis-pengembangan-usaha-pangan-masyarakat-pupm>
- BMU. 2016. Toko Tani Indonesia (TTI). <https://binamandiriutama.wordpress.com/2016/01/03/toko-tani-indonesia-tti/>
- Gigih, Prahardiantoro. 2018. Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap Kinerja Toko Tani Indonesia. Skripsi. Institut Pertanian Bogor.
- Kementan. 2017. Pedoman Teknis PUPM 2017. <http://bkp.pertanian.go.id>
- Kementan. 2016. TTI Hadir Untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=3394>
- Kurniasari. 2016. Toko Tani Indonesia Ubah Struktur Pasar, Harga Pangan Jadi Lebih Murah <http://www.bareksa.com/id/text/2016/07/01/toko-tani-indonesia-ubah-struktur-pasar-harga-pangan-jadi-lebih-murah/13580/analysis>.
- Nurmala, et al. 2012. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Purwaningsih, Y. e. (2008). Ketahanan Pangan : Situasi, Permasalahan, Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal ekonomi Pembangunan*. Balai Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Fakultas Ekonomi Unversitas Muhammadiyah Surakatra. Surakarta, Vol. 9 No. 1 Hal 1-27.